

Tamu Relasi KR



Perwakilan Harper Hotel Yogyakarta.



Perwakilan Kimaya Hotel Yogyakarta.



Perwakilan 101 Hotels.



Perwakilan Eastparc Hotel Yogyakarta.



Perwakilan Kalluna Restaurant Kotabaru Yogyakarta.



Perwakilan Novotel Hotel Yogyakarta.

PDIP

"Iya sudah ada persetujuan, nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya," ujar Megawati dalam penutupan Rakemas IV PDIP, kemarin. Ia mengaku tak dapat berbuat banyak terkait isu tersebut. Sebab, dirinya sebagai Ketua PDIP tak pernah mendeklarasikan duet Ganjar-Prabowo. "Aku terus di rumah melamun saja. Ini yang ngomong siapa ya? Aku kok ketua umum malah tidak mengerti, coba sudah tidak usah didengarkan," katanya.

Djarot mengatakan keempat parpol pengusung Ganjar meliputi PDIP, PPP, Hanura dan Perindo. "Artinya apa, tidak mungkin ya, sekali lagi, tidak mungkin, dan menutup kemungkinan sama sekali Pak Ganjar untuk

diturunkan sebagai cawapres. Beliau menilai, kegiatan budaya seperti ini merupakan hal bagus, ruwat bumi dimaksudkan agar memberikan kesuburan, ketenteraman, kedamaian. Hal ini sekaligus bentuk *nguri-uri* kebudayaan dan pem-

Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, wacana duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 tidak realistis. "Saya melihat wacana duet Ganjar dan Prabowo itu kurang realistis," kata Saidiman di Jakarta. Menurut Saidiman, Ganjar dan Prabowo sangat kompetitif dan berpeluang menangi Pilpres 2024. Ia meyakini kedua tokoh yang diusung sebagai bakal capres tersebut tidak mau menjadi orang nomor dua atau cawapres. "Keduanya juga berasal dari partai terbesar dan sekarang mendapatkan efek ekor jas dari popularitas Ganjar dan Prabowo sebagai bakal capres," jelasnya. (Ant/Obi)-f

Berharap

Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH sebelum pemberangkatan peserta kirab mengatakan, kegiatan ini merupakan sebuah anugerah bagi Kota Magelang, sebuah kota kecil yang akhir-akhir ini menjadi tempat penyelenggaraan be-

berapa event besar. KH M Yusuf Chudori atau Gus Yusuf menilai, kegiatan budaya seperti ini merupakan hal bagus, ruwat bumi dimaksudkan agar memberikan kesuburan, ketenteraman, kedamaian. Hal ini sekaligus bentuk *nguri-uri* kebudayaan dan pem-

Pengembalian

BPKH mulai mendistribusikan pengembalian lebih bayar pelunasan Biph sebagian jemaah haji 1444H/2023M ke rekening jemaah. Daftar nama jemaah yang mengalami lebih bayar pelunasan Biph dapat dilihat pada <https://bit.ly/DataJemaahPengembalianLebihBayarBiph2023>. Apabila terdapat nama para jemaah

dalam tautan tersebut dapat menghubungi Bank Penerima Setoran Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) setempat. Dalam proses distribusi pengembalian lebih bayar pelunasan Biph sebagian jemaah haji 1444 H/2023 M, jemaah haji agar berhati-hati dan memperhatikan beberapa hal dalam proses tersebut diantaranya, jemaah diminta untuk tidak ter-

pancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus/mempercepat proses pembayaran tersebut agar penanganan pembayaran selisih saldo dapat berjalan lancar. Pembayaran pengembalian selisih saldo jemaah oleh Bank Penerima Setoran dilakukan mulai Senin (25/9) sampai 31 Maret 2024. (Ati)-f

'Social

Di sisi lain, penggunaan *social commerce* selama ini dikhawatirkan akan memberikan dampak bagi kerawanan kebocoran penggunaan data pribadi maupun penyalahgunaan masuknya produk ilegal. Artinya, kebijakan larangan *social commerce* ini sudah tepat. Aturan ini diharapkan akan mampu menjadi benteng liberalisasi perdagangan.

UMKM tidak sekadar hanya dengan memberikan kebijakan larangan *social commerce* dan memberikan regulasi khusus terhadapnya. Tetapi pemerintah harus juga melakukan pendampingan dan penguatan terhadap *e-commerce* yang sudah ada. *E-commerce* yang ada harus memberikan porsi yang lebih bagi UMKM sehingga mendapatkan porsi yang lebih dominan.

commerce yang di dalamnya nanti juga mencakup pengembangan *social commerce*. Sehingga arah, target dan program yang terkait dengannya dapat dilaksanakan dengan baik. Selain upaya penguatan *e-commerce*, yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan standarisasi produk-produk UMKM. Sehingga memenuhi standar ketika masuk ke *marketplace* yang ada. Selama ini, kenapa *marketplace* didominasi oleh produk impor dikarenakan produk-produk UMKM kalah secara kualitas.

Sosialisasi larangan perdagangan melalui *social commerce* perlu dilakukan agar masyarakat dan pelaku UMKM menjadi lebih paham. Selain itu, ke depan perlu kiranya ada regulasi khusus yang lebih detail mengenai aturan-aturan yang harus muncul di dalam *social commerce*. Misalnya perlu juga ada kewajiban bagi *social commerce* untuk memberikan pembinaan dan prioritas perlindungan bagi produk-produk UMKM. *Social commerce* seharusnya diarahkan untuk lebih menjadi sarana agen pemasaran bagi produk-produk UMKM lokal dibandingkan memfasilitasi produk-produk impor. Upaya melakukan perlindungan terhadap

Selama ini produk-produk yang tampil di *e-commerce* masih didominasi oleh produk-produk dari usaha besar dan juga produk impor. Di era pandemi covid sebelumnya banyak tumbuh dan berkembang *e-commerce* yang diinisiasi oleh komunitas maupun pemerintah lokal. Namun sayangnya banyak *e-commerce* ini yang tidak berlanjut karena tidak direspons dan dibranding dengan baik oleh pemerintah. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat saat pandemic covid-19, keberadaan *e-commerce* ini telah ikut membantu penyelamatan produk-produk UMKM. Karenanya menjadi penting bagi pemerintah untuk memiliki peta jalan pengembangan e-

Disinilah fungsi pemerintah untuk terus melakukan fasilitasi dan mediasi agar produk-produk UMKM ini memiliki daya saing dan memenuhi standar masuk ke *marketplace local*. Literasi digital pelaku UMKM juga harus dijalankan selaras dengan hal tersebut. Peningkatan kapasitas *social commerce* maupun *e-commerce* akan berkorelasi dengan peningkatan dan standarisasi produk-produk UMKM. (Penulis adalah Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM)-f

Sambungan hal 1

Pondasi

Usai pembacaan Ikrar, dilanjutkan pembacaan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Selesai upacara, Presiden dan Wapres beserta rombongan terbatas melakukan peninjauan ke sumur Lubang Buaya. Turut hadir dalam upacara ini antara lain, para pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapoli Jenderal Listyo Sigit Prabowo, perwakilan negara sahabat, keluarga Pahlawan Revolusi, dan para Kepala Staf Angkatan. Sementara itu dalam unggahan di akun media sosial pribadinya, Presiden Joko

Widodo mengungkapkan, ideologi Pancasila adalah pondasi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini, seperti perubahan iklim, krisis pangan, krisis energi, resesi ekonomi, hingga disrupsi teknologi. "Di tengah berbagai tantangan dan situasi itu, Indonesia tetap melangkah ke depan bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seberat apapun tantangan dan rintangannya, dengan ideologi Pancasila sebagai pondasi, kita bergandeng tangan dan tetap bersatu menuju Indonesia maju," kata Presiden di akun Twitter-nya @Jokowi. (Ati)-f

Sambungan hal 1

Tak Ada

Maafud juga merespons sejumlah laporan terbaru penyidikan dugaan korupsi di tubuh Kementan RI. Temuan yang dimaksud berupa laporan adanya upaya pemusnahan dokumen di gedung Kementan saat Tim Penyidik Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan. "Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada, saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada, harus diusut. Satu korupsi sendiri itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri, itu harus dikejar," tutuhnya. Maafud mengaku siap turun tangan dalam membantu upaya aparat penegak hukum mengungkap seluruh temuan terbaru dalam dugaan korupsi di lingkup Kementan. "Kalau

ada kesulitan di situ, bilang ke saya, saya turun tangan," tandasnya. Ditambahkan Maafud, seluruh perkembangan dalam kasus di Kementan harus diusut hingga tuntas. "Satu korupsinya, dua senjatanya, tiga upaya pelenyapan dokumen," ujarnya. KPK telah menerapkan pasal pemerasan sesuai Pasal 12 (e) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi soal pemerasan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Tapi belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung. (Ant/Has)-f

Sambungan hal 1

Menpora

"Jabatan itu datang kapan saja dan bisa diambil kapan saja. Kita yang penting kerja yang terbaik saja," katanya. Dito menambahkan seluruh fakta persidangan telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang sudah ia klarifikasi berdasarkan keterangan yang ia ketahui. Sehingga siap menghadapi seluruh proses hukum beserta risiko yang akan ia terima dari keadaan tersebut. "Ya semuanya harus kita hadapi dan ada risikonya," tegasnya. Sebelumnya diberitakan, nama Dito Ariotedjo terseret dalam kasus BTS 4G setelah Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G menyebut

bahwa ia menyerahkan kepada seseorang bernama Dito Ariotedjo. (Ant/Has)-f



Prakiraan Cuaca		Senin, 2 Oktober 2023				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Steman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Fenomena Kaesang Menjelang Pemilu 2024

Dr. Junaidi, S.Ag., M.Hum., M.Kom
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

MELIHAT dinamika dan fenomena politik yang berkembang dewasa ini menjelang pesta demokrasi 2024, tidak berlebihan jika kita katakan bahwa proses demokratisasi yang sedang berlangsung masih menyentuhkan lapisan kehidupan yang masih tipis. Denyut reformasi yang sudah berlangsung puluhan tahun sejak 1998 lebih memformulasikan diri dalam bentuk formalitas yang belum substantif dalam relung politik faktual. Arah politik dan "sandiwar" politik masih direayasa sedemikian rupa sehingga masih sarat dengan nuansa yang tidak searah dengan denyut nadi moralitas demokrasi. Tak ayal, pesta demokrasi yang sejatinya diharapkan mencerahkan, kegembiraan dan kebahagiaan rakyat masih terjadi insiden dan konflik dalam realitas masyarakat.

Munculnya dan "tragedi" terpilihnya Kaesang putra presiden Jokowi sebagai ketua umum partai politik PSI (Partai Solidaritas Indonesia) cukup membuat publik "kaget" dan bertanya-tanya karena tidak memiliki pengalaman latar belakang politik sebelumnya. Agaknya, fenomena Kaesang mampu menyedot perhatian publik dan menjadi diskursus politik praktis yang sedang berlangsung.

Sedidaknya ada empat faktor yang dapat kita jadikan tolok ukur untuk menilai yang mendorong terpilihnya Kaesang sebagai ketua umum partai dalam pentas demokrasi di Indonesia. Pertama, faktor sosialisasi politik internal keluarga dan partai pengusung Kaesang. Sosialisasi politik merupakan satu konsep yang menentukan perilaku politik masyarakat. Studi-studi sosialisasi tentunya menarik dan penting, studi ini dapat membantu kita memahami dasar-dasar dukungan terhadap suatu sistem politik. Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik. Setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya.

Kedua, rekrutmen politik praktis. Ada dasar pemikiran dalam melakukan rekrutmen diantaranya adalah prinsip ketokohan, prinsip kemanfaatan atau kepentingan bersama, prinsip ideologis, prinsip perimbangan suara, prinsip demokrasi, prinsip keterbukaan, prinsip keadilan dan termasuk prinsip kesetaraan.

Fungsi rekrutmen politik dilakukan tidak lepas berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan. Akan tetapi kenyataannya hampir semua partai politik tidak mengatur pelaksanaan rekrutmen politik dalam AD/ART partai mereka. Akibatnya rekrutmen politik selama ini dilakukan secara pragmatis atau sesuai dengan kehendak atau keinginan dari elit parpol. Hal ini terindikasi salah satu sebabnya adalah ketiadaan prinsip yang "permanen" dalam rekrutmen kaderisasi politik. Akibatnya partai politik tidak (belum) mempunyai panduan atau pedoman untuk menyusun pola rekrutmen politik berdasar AD/ART partai politik.

Ketiga, budaya patronase. Asumsi Martin Sheffer menjelaskan bahwa patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan politik. Patronase juga merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan kelompok komunitas. Relasi patronase yang dikonstruksikan bersifat instrumental, artinya kedua belah pihak akan saling memperhitungkan untung rugi dari hubungan yang mereka bangun dalam "jual beli" kekuasaan dan transaksi komersial tersebut.

Keempat, institusional partai politik yang lemah. Partai politik pada dasarnya merupakan pilar utama dalam sistem politik demokrasi. Kualitas demokrasi akan sangat ditentukan oleh eksistensi partai politik. Oleh karena itu, penting untuk segera menata ulang institusional partai politik dengan cara memperkuat derajat kelebagaannya. Kelebagaannya partai politik tidak boleh dipandang sebelah mata. Kehidupan demokrasi dan perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, partai politik dipandang sebagai institusi yang menentukan kualitas demokrasi.

Fenomena Kaesang sebagai lokomotif anak muda yang tampil dalam partai politik PSI tentu tidak lepas dari pengaruh kepaiwaan dan kesuksesannya sebagai pengusaha yang menghimpun kekayaan dan modal yang cukup untuk berkontribusi dalam membesarkan partai politik praktis. Terlepas dari pengaruh presiden Jokowi dan keluarga besarnya, tentu ini menjadi catatan sejarah yang "cacat" moral dan secara etik-estetik melanggar nurani masyarakat.

Bagi filosof Aristoteles, politik merupakan hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Politik pada hakikatnya adalah bagian dari umat manusia yang tidak bisa dipisahkan dari keterpaduannya dengan berbagai aspek kehidupannya. Baik secara sadar maupun tidak sadar tiap manusia melakukan hal-hal yang bersifat politik, serta berada dalam lingkungan yang disebut 'sistem politik'. Artinya, politik tidak secara otomatis sama dengan ilmu politik. Semogal.